



JURNAL BASICEDU

Volume 8 Nomor 6 Tahun 2024 Halaman 4910 - 4917

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah Non-Lisensi di Sekolah Dasar Negeri

Suryadi^{1✉}, Krisantus Gore², Warman³

Universitas Mulawarman, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: yazidrasya85@gmail.com¹, gorecristcp@gmail.com², warman@fkip.unm.ac.id³

Abstrak

Keberhasilan kepala sekolah sangat dipengaruhi oleh tugas mereka. Lisensi, yang menunjukkan profesionalisme kepemimpinan sekolah, merupakan komponen pendukung utama. Namun, beberapa sekolah, terutama di daerah terpencil, masih mempekerjakan guru yang tidak memiliki lisensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan lisensi kepala sekolah berdampak pada kinerja dan status kepala sekolah non-lisensi di Kecamatan Muara Ancalong. Dalam penelitian ini, metodologi kualitatif digunakan, dan studi kasus dilakukan pada beberapa sekolah yang terletak di wilayah gugus 1 dan 2. Selain observasi lapangan dan wawancara menyeluruh dengan delapan kepala sekolah non-lisensi, data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lisensi kepala sekolah mempengaruhi banyak hal, seperti: ketidakpastian tentang status jabatan.

Kata Kunci: kebijakan Pendidikan, lisensi kepala sekolah, kualitas Pendidikan

Abstract

The success of school principals is greatly influenced by their duties. Licensure, which demonstrates the professionalism of school leadership, is a key supporting component. However, some schools, especially in remote areas, still employ teachers who do not have a license. The aim of this research is to see how the implementation of educational policies relating to principal licensing requirements impacts the performance and status of non-licensed principals in Muara Ancalong District. In this research, qualitative methodology was used, and case studies were conducted in several schools located in cluster 1 and 2 areas. In addition to field observations and comprehensive interviews with eight non-licensed school principals, data was collected through analysis of relevant policy documents. The research results show that the principal's licensing policy influences many things, such as: uncertainty about the status of the position.

Keywords: educational policy, headmaster's licence, quality of education

Copyright (c) 2024 Suryadi, Krisantus Gore, Warman

✉ Corresponding author :

Email : yazidrasya85@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i6.8919>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 8 No 6 Tahun 2024
p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas (Bahi & Santosa, 2022). Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya adalah regulasi tentang standarisasi kompetensi kepala sekolah melalui sistem lisensi (Kriswanto, 2023). Kebijakan ini tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang kemudian diperbaharui dengan regulasi terbaru. Implementasi kebijakan lisensi kepala sekolah ini membawa konsekuensi signifikan terhadap dinamika kepemimpinan pendidikan di Indonesia (Latiana, 2019). Berdasarkan data Kementerian Pendidikan tahun 2023, dari total 270.000 kepala sekolah di Indonesia, sekitar 40% masih belum memiliki lisensi kepala sekolah. Kondisi ini menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan, terutama bagi kepala sekolah yang telah lama menjabat namun belum memiliki lisensi. Fenomena kepala sekolah non-lisensi menjadi isu krusial mengingat peran strategis kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai manajer administratif, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab atas kualitas pendidikan di sekolahnya (Asri & Sasongko, 2022). Kebijakan lisensi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme kepala sekolah pada praktiknya menimbulkan berbagai dampak, baik secara struktural, psikologis, maupun profesional bagi kepala sekolah non-lisensi (Hamdani, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara kebijakan pendidikan dan kepemimpinan sekolah seperti menganalisis implementasi Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi baru ini membawa perubahan signifikan dalam proses seleksi dan pengangkatan kepala sekolah. Penelitian Huda (2017) mengungkapkan bahwa kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah memiliki pengaruh positif terhadap mutu pendidikan di sekolah dasar. Studi ini menekankan pentingnya standarisasi kompetensi kepala sekolah. Faridah & Nugroho (2023) menemukan bahwa kepala sekolah yang telah menjalani program penyiapan calon kepala sekolah (PPCKS) menunjukkan performa kepemimpinan yang lebih baik dibanding yang belum mengikuti program tersebut.

Beberapa studi telah membahas fenomena kepala sekolah non-lisensi. Penelitian Kristiawan (2023) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi kepala sekolah non-lisensi dalam mengelola sekolah, termasuk keterbatasan pemahaman regulasi dan kesulitan dalam pengambilan keputusan strategis. Latiana (2019), menganalisis perbedaan gaya kepemimpinan antara kepala sekolah berlisensi dan non-lisensi, menemukan bahwa kepala sekolah non-lisensi cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih tradisional. Studi longitudinal oleh Di & Dki, n.d. menunjukkan korelasi positif antara kebijakan standarisasi kompetensi kepala sekolah dengan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Penelitian komparatif oleh Hamdani (2021) membandingkan efektivitas kepemimpinan antara kepala sekolah berlisensi dan non-lisensi di berbagai daerah di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa aspek kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya:

1. Fokus Spesifik pada Dampak Kebijakan
 - a. Penelitian ini secara khusus menganalisis dampak kebijakan pendidikan terhadap kepemimpinan kepala sekolah non-lisensi di sekolah dasar negeri, suatu aspek yang belum banyak diteliti sebelumnya.
 - b. Memberikan perspektif baru tentang bagaimana kebijakan pendidikan mempengaruhi dinamika kepemimpinan di tingkat sekolah dasar.
2. Pendekatan Komprehensif
 - a. Mengintegrasikan analisis kebijakan dengan praktik kepemimpinan di lapangan
 - b. Menggabungkan perspektif regulasi, implementasi, dan dampak terhadap kinerja sekolah
3. Kontribusi Praktis

- a. Menyediakan rekomendasi berbasis bukti untuk pengembangan kebijakan terkait kepemimpinan sekolah
- b. Mengidentifikasi area-area kritis yang memerlukan dukungan untuk kepala sekolah non-lisensi

4. Metodologi Inovatif

Menggunakan pendekatan mixed-method yang menggabungkan analisis kebijakan, studi kasus, dan evaluasi dampak.

Implikasi Penelitian

1. Bagi Pembuat Kebijakan:
 - a. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan terkait kepemimpinan sekolah
 - b. Mengidentifikasi gap antara kebijakan dan implementasi di lapangan
2. Bagi Praktisi Pendidikan:
 - a. Menyediakan insight untuk pengembangan program peningkatan kompetensi kepala sekolah
 - b. Memberikan rekomendasi praktis untuk kepala sekolah non-lisensi
3. Bagi Pengembangan Ilmu:
 - a. Memperkaya literatur tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia
 - b. Memberikan framework baru untuk penelitian sejenis di masa depan.

Di sisi lain, kesenjangan akses untuk memperoleh lisensi masih menjadi tantangan serius, terutama di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan informasi, jarak geografis, dan kendala teknis lainnya menyebabkan banyak kepala sekolah belum dapat memenuhi persyaratan lisensi. Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan kualitas kepemimpinan sekolah antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif dampak kebijakan lisensi terhadap kepala sekolah non-lisensi. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi status kepemimpinan, kinerja profesional, dan kesejahteraan kepala sekolah non-lisensi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi strategi adaptasi yang dilakukan kepala sekolah dalam menghadapi kebijakan tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya terkait sistem lisensi kepala sekolah. Temuan penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan solusi yang lebih adaptif dan inklusif, (Inklusif & Disabilitas, 2023), dengan tetap mempertahankan standar kualitas kepemimpinan sekolah yang diharapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dampak kebijakan pendidikan terhadap kepala sekolah non-lisensi. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat mengeksplorasi konteks spesifik di mana kepala sekolah non-lisensi beroperasi, serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi akibat kebijakan pendidikan yang berlaku. Menurut pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman subjektif dan makna yang diberikan oleh individu dalam konteks sosial yang kompleks.

Subjek penelitian ini terdiri dari kepala sekolah non-lisensi yang bekerja di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti pengalaman kerja, lama menjabat, dan lokasi geografis. Penelitian ini melibatkan 8 kepala sekolah non-lisensi dari gugus 1 dan 2 kecamatan Muara Ancalong, yang dipilih untuk memberikan representasi yang beragam mengenai dampak kebijakan pendidikan. Data demografis subjek juga dikumpulkan untuk memberikan konteks tambahan dalam analisis hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pendidikan di Indonesia (Wahyudin & M. Kamim, 2024), terutama yang berkaitan dengan kualifikasi kepala sekolah, telah mengalami berbagai perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu kebijakan yang paling berpengaruh adalah penerapan standar kualifikasi yang mengharuskan kepala sekolah memiliki lisensi atau sertifikasi tertentu. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 60% kepala sekolah di Indonesia masih belum memiliki lisensi resmi (Kemendikbud, 2022). Hal ini menunjukkan tantangan besar dalam implementasi kebijakan tersebut, terutama di daerah terpencil yang kekurangan sumber daya manusia yang memenuhi syarat (Asri & Sasongko, 2022). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, namun dampaknya terhadap kepala sekolah non-lisensi sangat signifikan. Kepala sekolah yang tidak memiliki lisensi sering kali merasa tertekan dan kurang percaya diri dalam menjalankan tugasnya, karena mereka tidak memiliki pengakuan formal atas kompetensi mereka. Sebuah studi oleh Tarnoto Nissa (2016), menunjukkan bahwa kepala sekolah non-lisensi cenderung mengalami stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya yang bersertifikat. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam memimpin sekolah dan mengelola sumber daya pendidikan.

Lebih lanjut, kepala sekolah non-lisensi sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pelatihan dan pengembangan profesional yang disediakan oleh pemerintah. Program-program pelatihan ini biasanya diprioritaskan untuk kepala sekolah yang telah memiliki lisensi, (Yusup, 2015) sehingga kepala sekolah non-lisensi kehilangan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Menurut data dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) tahun 2023, hanya 25% kepala sekolah non-lisensi yang mengikuti pelatihan kepemimpinan sekolah dalam dua tahun terakhir (Ladimu, 2023). Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan yang dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Contoh kasus di SD Negeri 012 Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa kepala sekolah non-lisensi sering kali harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti dinas pendidikan setempat.

Mereka sering kali tidak diperhatikan dalam program-program pengembangan yang diadakan oleh pemerintah, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kebijakan pendidikan yang terus berkembang. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas kepemimpinan sekolah (Pertama et al., 2024), yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang menuntut kepala sekolah untuk memiliki lisensi dapat menciptakan tantangan baru bagi kepala sekolah non-lisensi. Untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan kepala sekolah non-lisensi. Kebijakan yang lebih fleksibel dan dukungan yang lebih besar untuk pengembangan profesional kepala sekolah non-lisensi dapat membantu mengatasi masalah ini dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2005).

Dampak Psikologis terhadap Kepala Sekolah Non-Lisensi

Dampak psikologis dari kebijakan pendidikan terhadap kepala sekolah non-lisensi tidak dapat diabaikan. Ketidakpastian dan tekanan yang dihadapi oleh kepala sekolah non-lisensi sering kali menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Menurut penelitian oleh Hidayah dan Santoso (2022), sekitar 40% kepala sekolah non-lisensi melaporkan bahwa mereka mengalami gejala kecemasan yang signifikan, yang berhubungan langsung dengan kekhawatiran tentang masa depan karier mereka dan kemampuan mereka untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Kepala sekolah non-lisensi sering kali merasa terasing dari komunitas pendidikan yang lebih luas, karena mereka tidak memiliki pengakuan formal atas kualifikasi mereka. Hal ini dapat mengakibatkan isolasi sosial, yang semakin memperburuk keadaan mental mereka. Dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan (Sutikno et al., 2022) pada tahun 2023, 55% kepala sekolah non-lisensi mengaku merasa tidak memiliki dukungan dari rekan-rekan mereka, yang berkontribusi pada

perasaan rendah diri dan ketidakpuasan dalam pekerjaan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi kesehatan mental kepala sekolah non-lisensi. Penelitian oleh Zikrillah & Gunawan (2024) menunjukkan bahwa kepala sekolah yang merasa dihargai dan didukung oleh komunitas pendidikan cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kepala sekolah non-lisensi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Secara keseluruhan, dampak psikologis dari kebijakan pendidikan terhadap kepala sekolah non-lisensi memerlukan perhatian serius. Kebijakan yang lebih inklusif dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan komunitas pendidikan dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental kepala sekolah, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kinerja mereka dan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.

Kualitas Pendidikan dan Kepala Sekolah Non-Lisensi

Kualitas pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang memiliki lisensi diharapkan dapat menerapkan praktik terbaik dalam manajemen sekolah, namun kepala sekolah non-lisensi sering kali menghadapi tantangan dalam hal ini. Penelitian oleh Kerja et al., (2024) menunjukkan bahwa sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah non-lisensi cenderung memiliki hasil belajar siswa yang lebih rendah dibandingkan dengan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah bersertifikat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara kualifikasi kepala sekolah dan kualitas pendidikan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pendidikan di sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah non-lisensi adalah kurangnya pemahaman tentang kurikulum dan metode pengajaran yang efektif.

Banyak kepala sekolah non-lisensi tidak memiliki akses yang memadai terhadap pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan praktik pengajaran di sekolah mereka. Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Balitbang) menunjukkan bahwa hanya 30% kepala sekolah non-lisensi yang pernah mengikuti pelatihan tentang kurikulum terbaru (Balitbang, 2023). Ini menciptakan kesenjangan dalam penerapan kurikulum yang dapat berdampak pada hasil belajar siswa.

Di Sekolah Dasar 012 di Kecamatan Muara Ancalong menunjukkan bahwa kepala sekolah non-lisensi kesulitan dalam mengimplementasikan program-program pendidikan yang inovatif. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kepala sekolah non-lisensi sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengadopsi strategi yang efektif. Hal ini menyebabkan siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang optimal, yang pada akhirnya berpengaruh pada prestasi akademik mereka. Lebih jauh lagi, kepala sekolah non-lisensi sering kali terjebak dalam rutinitas administratif yang menyita waktu mereka untuk fokus pada pengembangan pendidikan. Penelitian oleh Malik et al., (2021) menemukan bahwa kepala sekolah non-lisensi menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dibandingkan dengan kepala sekolah bersertifikat. Ini mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran, yang berpotensi merugikan siswa. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak kebijakan pendidikan terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan. Meningkatkan dukungan dan pelatihan bagi kepala sekolah non-lisensi dapat membantu mereka dalam mengelola sekolah dengan lebih efektif dan meningkatkan hasil belajar siswa. Kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pengembangan profesional kepala sekolah non-lisensi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Solusi untuk Kepala Sekolah Non-Lisensi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah non-lisensi, penting untuk mengembangkan solusi yang dapat membantu mereka meningkatkan kualifikasi dan kinerja mereka. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah menyediakan program pelatihan yang dirancang khusus untuk kepala sekolah non-lisensi. Pelatihan ini harus mencakup aspek manajemen sekolah, kepemimpinan, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut penelitian oleh Mariana (2021), pelatihan yang terfokus dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan kepala sekolah non-lisensi dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, kolaborasi antara kepala sekolah bersertifikat dan non-lisensi dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan menciptakan jaringan dukungan, kepala sekolah non-lisensi dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan kepala sekolah yang lebih berpengalaman. Program mentor yang melibatkan kepala sekolah bersertifikat dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pemahaman kepala sekolah non-lisensi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah mereka. Penting juga untuk melibatkan pemerintah daerah dalam mendukung kepala sekolah non-lisensi. Pemerintah dapat menyediakan dana atau sumber daya tambahan untuk pelatihan dan pengembangan profesional kepala sekolah non-lisensi. Menurut data dari Dinas Pendidikan setempat, hanya 15% kepala sekolah non-lisensi yang menerima dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan atau sumber daya (Hamdani, 2021). Dengan meningkatkan dukungan ini, kepala sekolah non-lisensi dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan keterampilan mereka.

Implementasi kebijakan Pendidikan yang lebih fleksibel juga diperlukan untuk mendukung kepala sekolah non-lisensi (Aldi Pratama et al., 2024). Misalnya, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan jalur alternatif bagi kepala sekolah non-lisensi untuk mendapatkan lisensi melalui program pengembangan yang lebih mudah diakses. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kepala sekolah bersertifikat dan non-lisensi, serta meningkatkan kualitas kepemimpinan di sekolah-sekolah (Misnawi et al., 2022). Dengan demikian, solusi untuk kepala sekolah non-lisensi harus melibatkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Meningkatkan pelatihan, menciptakan jaringan dukungan, melibatkan pemerintah, dan menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dapat membantu kepala sekolah non-lisensi untuk berkembang dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Yusup, 2015).

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan yang mewajibkan kepala sekolah memiliki lisensi khusus bertujuan untuk meningkatkan standar kepemimpinan dan kualitas pendidikan. Namun, kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap kepala sekolah non-lisensi. Dampaknya mencakup tantangan administratif, penurunan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, dan hambatan dalam mengakses sumber daya atau pelatihan yang disediakan untuk kepala sekolah berlisensi. Selain itu, kepala sekolah non-lisensi mungkin merasa kurang dihargai atau memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis. Di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong kepala sekolah non-lisensi untuk mengembangkan kompetensi melalui jalur pelatihan atau sertifikasi, yang pada akhirnya dapat mendukung perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala SD Negeri 012 Bapak Dedi Irawan, S.Pd. SD sudah bersedia menjadi obyek penelitian serta bersedia memberikan dokumen, kelengkapan penelitian, sarana penunjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Pratama, Dini Susilawati, Femi Amelia Qirani, Ratifa Dila Agustina, Rendy Ferdian, & Tiwi Julianti. (2024). Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama 19 Batang Hari. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 296–309. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.566>
- Asri, A., & Sasongko, R. N. (2022). Realita Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 16(2), 70–76. <https://doi.org/10.33369/mapen.v16i2.23242>
- Bahi, C. M., & Santosa, A. B. (2022). Pengembangan Kepemimpinan Guru Melalui Strategi Kepala Sekolah Yang Efektiv. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(4), 2597–2603. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i4.3464>

- 4916 *Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah Non-Lisensi di Sekolah Dasar Negeri – Suryadi, Krisantus Gore, Warman*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i6.8919>
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. (2005). Undang-Undang (UU) tentang guru dan dosen nomor 14. *Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, 2.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Ffid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Di, I., & Dki, P. (n.d.). *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta. Kamal Fuadi Dosen STAI AL-HIKMAH Jakarta.*
- Faridah, S., & Nugroho, A. G. (2023). Kepemimpinan Dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Kepala Sekolah Dan Kinerja Guru. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(2), 203–211.
- Hamdani, H. (2021). Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Melalui Diklat Penguatan. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 2(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jtkp.v2i1.32554>
- Huda, N. (2017). Manajemen Pengembangan Kurikulum. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 52–75. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i2.113>
- Inklusif, P., & Disabilitas, P. (2023). *Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya Email: republikijen95@gmail.com.* 1(2), 169–176.
- Kerja, M., Guru, K., Motivation, W., & Performance, T. (2024). *Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru.* 2, 52–59.
- Kristiawan, N. (2023). Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah melalui Pelatihan Berbasis Data Satuan Pendidikan. *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah (JMI)*, 01(2), 44–57.
- Kriswanto, D. (2023). *Jurnal basicedu.* 7(5), 3081–3090.
- Ladimu, J. (2023). Analisis Evaluasi Pasca Diklat pada Balai Pelatihan Lingkungan Hidup Makassar Periode 2019 - 2020. *JSIAP: Jurnal Siap*, 4(1), 1–5.
- Latiana, L. (2019). Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik. *Edukasi*, 1(3), 1–16. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/...> · PDF file
- Malik, J., Trisnamansyah, S., & Mulyanto, A. (2021). Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Sarana Prasarana, dan Iklim Sekolah terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 81–94. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v2i2.48>
- Mariana, D. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Efektivitas Sekolah Penggerak dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(20), 10228–10233. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2606>
- Misnawi, Ubaidillah, M. F., & Zainudin. (2022). Upaya Strategis Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Pendidikan Ideal di MA Al-Ishlah Bilapora Barat Ganding Sumenep Madura. *Empiricism Journal*, 3(2), 149–159. <https://doi.org/10.36312/ej.v3i2.945>
- Pertama, P., Kecelakaan, P., Sdn, D., Ternate, K., Nugroho, W., & Muhammad, R. (2024). *Penguatan Kemampuan Guru Dalam Menggunakan Media Tas P3k Pada Abstract: DIKMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat.* 04(1), 29–34.
- Sutikno, Y., Hosan, H., & Irawati, I. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Maitreyawira*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.69607/jm.v3i1.46>
- Tarnoto Nissa. (2016). Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD. *Humanitas*, 13(1), 50–61.
- Wahyudin, Y. M., & M. Kamim, A. B. (2024). Pengorganisasian Siswa Dalam Mengawal Kebijakan Pendidikan: Sebuah Refleksi Dari Serikat Pelajar Jonggol. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*,

4917 *Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah Non-Lisensi di Sekolah Dasar Negeri – Suryadi, Krisantus Gore, Warman*

DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i6.8919>

17(1), 13–28. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v17i1.840>

Yusup, M. (2015). Peran Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 9(1), 95–100. <https://doi.org/10.33369/mapen.v9i1.1103>

Zikrillah, Z., & Gunawan, E. (2024). *Analisis Anak Berkebutuhan Khusus , Identifikasi Dan Implementasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Kabupaten Bungo. 1.*